



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 221 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

**DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian pendidikan program Doktor pada Program Studi **Hukum Islam** mahasiswa atas nama **Andry Syafrizal Tanjung** NIM.4001183016, judul Disertasi "**Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah**", perlu diatur ketentuan tentang pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi dalam bentuk Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia Pelaksana Ujian Tertutup Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401 dan 032402/B.II/3/2020, tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan tahun 2020-2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

- Kesatu : Menetapkan Panitia, Penguji dan Pembimbing Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa atas nama **Andry Syafrizal Tanjung**, NIM. **4001183016**, sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tugas Panitia adalah:
- Mempersiapkan administrasi Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
 - Melaksanakan Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
 - Mengumumkan hasil Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
- Ketiga : Pelaksanaan ujian tertutup disertasi ini akan dilaksanakan pada **Selasa, 31 Mei 2022**.
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan
Tanggal 11 Mei 2022

Direktur,



Hasan Bakti Nasution
Hasan Bakti Nasution

- Keputusan ini disampaikan kepada:
- Rektor UIN Sumatera Utara Medan
 - Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA MEDAN
Nomor 221 Tahun 2022
Tanggal 11 Mei 2022

TENTANG
PENGUJI DAN PEMBIMBING UJIAN TERTUTUP DISERTASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NO	NAMA	Gol	JABATAN	KET.
1.	Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.	IV	Penguji Internal	
2.	Dr. Hasan Matsum, M.Ag.	IV	Penguji Internal	
3.	Prof. Dr. Sutiarnoto MS, SH, M.Hum.	IV	Penguji Eksternal	
4.	Dr. Dhiauddin Tanjung , MA	IV	Penguji Internal	
5.	Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH, M.Hum.	IV	Penguji Internal	



Direktur,

Hasan Bakti Nasution

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA MEDAN
Nomor 221 Tahun 2022
Tanggal 11 Mei 2022

TENTANG
PANITIA UJIAN TERTUTUP DISERTASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NO	NAMA	Gol	JABATAN	KET.
1.	Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A.	IV	Ketua	
2.	Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.	IV	Sekretaris	
3.	Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I., M.A.	IV	Sekretariat	
4.	Dr. Budi Sastra Panjaitan, S.H., M.Hum	IV	Sda	
5.	Bambang Lesmono, S.E., M.E.	III	Sda	
6.	Dedi Junaidi, S.E.	III	Sda	
7.	Ramli, S.E.	III	Sda	
8.	Gatot Teguh Arifyanto. S.H.	II	Sda	



Direktur,

Hasan Bakti Nasution

**SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DI
SUMATERA UTARA DALAM PERSPEKTIF MAQASID
ASY-SYARI'AH**

DISERTASI

OLEH

**ANDRY SYAFRIZAL TANJUNG
NIM: 4001183016**

**PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM STRATA 3**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
1443H/2022**

PERSETUJUAN DISERTASI BERJUDUL

**SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DI SUMATERA UTARA DALAM
PERSPEKTIF *MAQASIDASY-SYARI'AH***
(Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, Putusan
Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn dan Putusan Nomor
42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn)

OLEH :

ANDRY SYAFRIZAL TANJUNG
(NIM :4001183016)

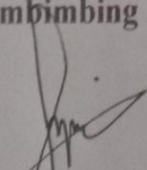
Program Studi

HUKUM ISLAM


Dapat Disetujui Dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Mencapai Gelar Doktor Dalam Bidang Hukum
Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Medan, Juli 2022

Pembimbing I


Prof. Dr. Asmuni, M.Ag
NIP. 196405271991032001
NIDN. 2020085402

Pembimbing II


Dr. Hasan Ma'sum, M. Ag
NIP. 196909252008011014
NIDN. 2025096902

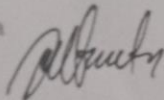
PENGESAHAN

Disertasi berjudul "SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA UTARA DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH (Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn dan Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn)" an. Andry Syafrizal Tanjung, NIM 4001183016, Program Studi Hukum Islam, telah diuji dalam Sidang Tertutup Disertasi Program Doktor (S-3) Pascasarjana UINSU medan pada tanggal 31 Mei 2022.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai saran dari para penguji sidang tertutup dan telah memenuhi syarat untuk diajukan sidang terbuka (Promosi Doktor) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

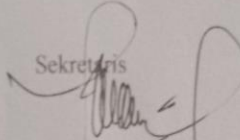
Medan, 8 Juli 2022
Panitia Sidang Tertutup Disertasi
Pascasarjana Uinsu Medan

Ketua



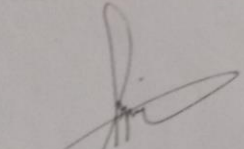
Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A
NIP. 196208141992031003

Sekretaris

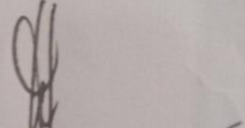


Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A
NIP. 196704231994031004

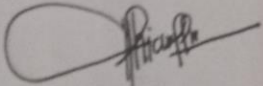
Anggota



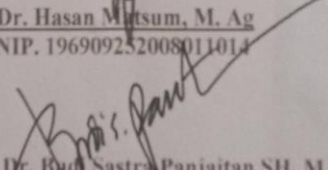
Prof. Dr. Asmuni, M.Ag
NIP. 196405271991032001



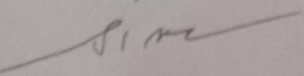
Dr. Hasan Matsum, M. Ag
NIP. 196909252008011014



Dr. Dhiauddin Tanjung SH, M.A
NIP. 197910202009011010

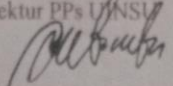


Dr. Bud Sastra Panjaitan SH, M.HUM
NIP. 197604202009011009



Prof. Dr. Sutiarnoto MS, SH, M. Hum
NIP. 195610101986031003

Mengetahui
Direktur PPs UINSU



Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A
NIP. 196208141992031003

ABSTRAK
**SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA
UTARA DALAM PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARI'AH***
**(Studi Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, Putusan Nomor
51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn dan Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN
Mdn)**

Nama: Andry Syafrizal Tanjung
Nim: 4001183016

Berdasarkan Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn kerugian negara yang diterima sebesar Rp 283.580.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sanksi yang dijatuhkan adalah berupa pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn kerugian negara yang diterima sebesar Rp. 230.851.900,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun 8 bulan, uang pengganti dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn kerugian negara yang diterima terdakwa sebesar Rp. 1.286.750.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu) sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 10 tahun, uang pengganti dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Terjadi kontradiksi mengenai sanksi yang ada didalam putusan tersebut dengan tindak pidana korupsi yang terjadi, jika menganalisisnya dengan menggunkan teori tujuan pemidanaan, keadilan distributif dan *Maqasid Asy-Syariah*.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Utara Dalam Prespektif *Maqasid asy-Syari'ah* dengan menggunkan teori tujuan pemidanaan, keadilan distributif dan *Maqasid Asy-Syariah* sehingga ditemukannya model rumusan sanksi denda { $X = Y (x) Z$ }, yaitu sebagai berikut: X = Sanksi Denda, Y = Jumlah kerugian keuangan negara, Z = Persentase (%). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus melalui Putusan di Sumatera Utara.

Setelah dilakukan analisis terhadap tindak pidana korupsi diatas melalui teori tujuan pemidanaan, keadilan distributif, dan maqasid syari'ah ditemukan bahwa sanksi pidana penjara terbilang ringan sehingga tidak menimbulkan efek jerah dan putusan belum memuat perincian secara sistematis tentang sanksi denda. Untuk itu peneliti memberikan rekomendasi dalam hal menentukan sanksi denda dengan rumus sebagai berikut, yaitu $X = Y (x) Z$ dengan penjelasan X = Sanksi Denda, Y = Jumlah kerugian keuangan negara yang diterima, Z = Persentase (%), Maka seharusnya sanksi dendanya adalah sebagai berikut: Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn sanksi dendanya = Rp. 62.387.600,-, Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN sanksi dendanya = Rp. 50.787.418,-, Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn sanksi dendanya = Rp. 411.760.000,-

ABSTRAC
CRIMINAL SANCTIONS AGAINST CRIMINAL CORRUPTION IN NORTH SUMATERA IN *MAQASID ASY-SYARIAH* PERSPECTIVE
(Study Decision Number 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, Decision Number 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn and Decision Number 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn)

Nama: Andry Syafrizal Tanjung
Nim: 4001183016

Based on Decision Number 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn the state loss received was Rp. 283,580,000,- (two hundred eighty three million five hundred and eighty thousand rupiah) the sanction imposed was in the form of imprisonment for 1 year. month and a fine of Rp. 50,000,000 (fifty million rupiah), based on Decision Number 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn. The state loss received is Rp. 230,851,900,- (two hundred thirty million eight hundred and fifty one thousand and nine hundred rupiah) the sanction imposed is imprisonment of 1 year and 8 months, compensation and a fine of Rp. 50,000,000 (fifty million rupiah) and based on Decision Number 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn the state loss received by the defendant was Rp. 1,286,750,000,- (one billion two hundred eighty-six million seven hundred fifty thousand) the sanction imposed is 10 years in prison, compensation and a fine of Rp. 300,000,000, - (three hundred million rupiah). There is a contradiction regarding the sanctions contained in the decision with the corruption that occurred, if analyzing it using the theory of sentencing objectives, distributive justice and Maqasid Asy-Syariah.

The purpose of this research is to analyze criminal sanctions against criminal acts of corruption in North Sumatra in the perspective of Maqasid asy-Shari'ah by using the theory of the purpose of punishment, distributive justice and Maqasid Asy-Syariah so that a model for the formulation of fine sanctions is found { $X = Y (x) Z$ }, as follows: X = Penalty Sanctions, Y = Total state financial losses, Z = Percentage (%). The type of research used is normative juridical with a case approach through decisions in North Sumatra.

Criminal sanctions against corruption in North Sumatra, if analyzed with the theory of the purpose of punishment, distributive justice and maqasid ash-shari'ah, based on the three decisions, the prison sentence is too light and the three decisions do not have systematic details regarding fines. In this dissertation based on the results of the research, the authors recommend the formulation model in determining fines { $X = Y (x) Z$ }, as follows: X = Penalties, Y = Total state financial losses received, Z = Percentage (%) . Then the fine should be as follows: Decision Number 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn the fine = Rp. 62,387,600,-, Decision Number 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN the fine = Rp. 50,787,418,-, Decision Number 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn the fine = Rp. 411.760.000,-

الختصار

مقشيد منظور في سومطرة شمال في الفساد جرائم على جنائية عقوبات

، Pid.Sus-TPK / 2018 / PN Mdn / 124 رقم الدراسة قرار

رقم والقرار Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Mdn / 51 رقم القرار

42 / Pid.Sus-TPK / 2020 / PN Mdn

تانجونج سيفريزال أندري : الاسم

: الرقم ٦١٠٣٨١١٠٠٤

الدولة خسارة كانت ، Pid.Sus-TPK / 2018 / PN Mdn / 124 رقم القرار على بناء

- وخمسمائة مليوناً وثمانون وثلاثة مائتان (روبية 283.580.000 المستلمة سنة 1 لمدة حبس شكل في المفروضة العقوبة كانت) روبية ألف وثمانون القرار على بناء ، (روبية مليون خمسون) روبية 50000 قدرها وغرامة شهر Rp. 230.851.900 هي المستلمة الدولة خسارة . Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Mdn / 51 رقم
- وتسعمائة ألفاً وخمسون وثمانمائة مليوناً وثلاثون مائتان (أشهر وثمانية واحدة سنة لمدة السجن هي المفروضة العقوبة) روبية على وبناء) روبية مليون خمسون (روبية 50.000.000 قدرها وغرامة وتعويض تلقاها التي الدولة خسارة كانت Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn / 42 رقم القرار
- وثمانون وستة ومائتان مليار) ، 1.286.750.000 . روبية عليه المدعى السجن في سنوات 10 هي المفروضة العقوبة) ألفاً وخمسون وسبعمائة مليوناً
- .) روبية مليون ثلاثمائة (300.000.000 . روبية وغرامة الأموال واستبدال الذي الفساد مع القرار في الواردة بالعقوبات يتعلق فيما تناقض وهناك التوزيعية والعدالة الحكم أهداف نظرية باستخدام تحليله تم إذا حدث الشريعة ومقاصد

الفساد أعمال ضد الجنائية العقوبات تحليل هو الدراسة هذه من الغرض نظرية باستخدام الشريعة مقاصد منظور من سومطرة شمال في الإجرامية بحيث الإسلامية الشريعة ومقاصد التوزيعية والعدالة العقاب من الغرض على { $X = Y(x)Z$ } الغرامة عقوبات صياغة على العثور تم نموذجاً يكون المالية الخسائر إجمالي $Y =$ ، الجزائية العقوبات $X =$: التالي النحو معياري قانوني المستخدم البحث نوع .) % (المئوية النسبة $Z =$ ، للدولة سومطرة شمال في قرارات خلال من الحالة نهج مع بنظرية تحليلها تم إذا ، سومطرة شمال في الفساد ضد الجنائية العقوبات على بناء ، الشريعة ومقاصد التوزيعية والعدالة العقوبة من الغرض لا الثلاثة والقرارات للغاية مخففة السجن عقوبة فإن ، الثلاثة القرارات بناء الرسالة هذه في .بالغرامات يتعلق فيما منهجية تفاصيل على تحتوي الغرامات تحديد في الصياغة بنموذج المؤلفون يوصي ، البحث نتائج على الخسائر إجمالي $Y =$ ، العقوبات $X =$: التالي النحو على ، { $X = Y(x)Z$ } أن يجب ثم .) % (المئوية النسبة $Z =$ ، المتلقاة الحكومية المالية Pid.Sus-TPK / 2018 / PN Mdn / 124 رقم القرار : التالي النحو على الغرامة تكون Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Mdn / 51 - رقم القرار ، ، Rp. 62.387.600 = الغرامة Pid.Sus-TPK / 2020 / PN Mdn / 42 - رقم القرار ، ، Rp. 50.787.418 = الغرامة Rp. 411.760.000 = الغرامة

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DISERTASI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Kegunaan Penelitian	19
E. Penjelasan Istilah	19
F. Kajian Terdahulu	24
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KAJIAN TEORITIS	27
A. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam	27
1. Pengertian	27
2. Dasar Hukum	28
3. Jenis-Jensi Tindak Pidana Korupsi.....	34
4. Jenis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	42
B. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif.....	55
1. Pengertian	55
2. Dasar Hukum	56
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	58
4. Jenis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	59
5. Kewenangan Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	76
C. Teori Tujuan Pemidanaan.....	100
D. Teori Keadilan Distributif	110

	E. Teori <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i>	112
BAB III	METODE PENELITIAN	127
	A. Paradigma Penelitian.....	127
	B. Jenis Penelitian	127
	C. Pendekatan Penelitian.....	129
	D. Sumber Data	130
	E. Teknik Pengumpulan Data	131
	F. Analisis Data	132
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	133
	A. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Utara Berdasarkan Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn Dalam Prespektif <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i>	133
	B. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Utara Berdasarkan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn Dalam Prespektif <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i>	154
	C. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Utara Berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn Dalam Prespektif <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i>	177
BAB V	PENUTUP	210
	A. Kesimpulan.....	210
	B. Saran	212
	DAFTAR PUSTAKA	213



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 268 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

**DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian pendidikan program Doktor pada Program Studi **Hukum Islam** mahasiswa atas nama **Arminsyah NIM.4001173012**, judul Disertasi "**Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Keadilan Dan Teori Sistem Jasser Auda**", perlu diatur ketentuan tentang pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi dalam bentuk Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia Pelaksana Ujian Tertutup Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401 dan 032402/B.II/3/2020, tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan tahun 2020-2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN UJIAN TERTUTUP DISERTASI**
- Kesatu : Menetapkan Panitia, Penguji dan Pembimbing Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa atas nama **Arminsyah**, NIM. **4001173012**, sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tugas Panitia adalah:
a. Mempersiapkan administrasi Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
b. Melaksanakan Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
c. Mengumumkan hasil Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
- Ketiga : Pelaksanaan ujian tertutup disertasi ini akan dilaksanakan pada **Rabu, 6 Juli 2022**.
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan
Tanggal 13 Juni 2022

Direktur,



Hasan Bakti Nasution
Hasan Bakti Nasution

- Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA MEDAN
Nomor 268 Tahun 2022
Tanggal 13 Juni 2022

TENTANG
PENGUJI DAN PEMBIMBING UJIAN TERTUTUP DISERTASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NO	NAMA	Gol	JABATAN	KET.
1.	Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.	IV	Penguji Internal	
2.	Dr. Fauziah Lubis, S.H, M.Hum.	IV	Penguji Internal	
3.	Prof. Dr. O.K. Saidin, S.H, M.Hum.	IV	Penguji Eksternal	
4.	Prof. Dr. Pagar, M.Ag.	IV	Penguji Internal	
5.	Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH, M.Hum.	IV	Penguji Internal	



Direktur,

Hasan Bakti Nasution

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA MEDAN
Nomor 268 Tahun 2022
Tanggal 13 Juni 2022

TENTANG
PANITIA UJIAN TERTUTUP DISERTASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NO	NAMA	Gol	JABATAN	KET.
1.	Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A.	IV	Ketua	
2.	Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.	IV	Sekretaris	
3.	Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I., M.A.	IV	Sekretariat	
4.	Dr. Budi Sastra Panjaitan, S.H., M.Hum	IV	Sda	
5.	Bambang Lesmono, S.E., M.E.	III	Sda	
6.	Dedi Junaidi, S.E.	III	Sda	
7.	Ramli, S.E.	III	Sda	
8.	Gatot Teguh Arifyanto. S.H.	II	Sda	



Direktur,

Hasan Bakti Nasution

**HAK PEKERJA DALAM UNDANG UNDANG CIPTA KERJA
PERSPEKTIF *MĀQASID AL-SYARĪAH*, Keadilan
DAN TEORI SISTEM**

Disertasi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat sidang terbuka
Program Doktor Prodi Hukum Islam

Oleh:

Arminsyah

NIM. 4001173012



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM S3
MEDAN 2022 M**

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul:

HAK PEKERJA DALAM UNDANG UNDANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF MĀQAŞID AL-SYARĪ'AH, KEADILAN DAN TEORI SISTEM

Oleh:


Arminsyah

NIM. 4001173012

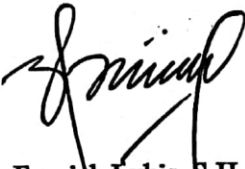
Dapat Disetujui dan Disahkan Untuk Diuji pada Sidang Terbuka
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Doktor pada Program Studi Hukum Islam
Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan

Medan, 14 Juli 2022

Pembimbing



Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.
NIP. 19540820 198203 1 002



Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.Hum.
NIP. 19710528 200801 2 013

PENGESAHAN

Disertasi berjudul "*Hak Pekerja Dalam Undang Undang Cipta Kerja Perspektif Muqasid Al-Syar'ah, Keadilan dan Teori Sistem Jasser Auda*" An. Arminsyah, NIM. 4001173012, Program Studi Hukum Islam, telah diuji dalam Sidang Tertutup Disertasi Program studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara medan, pada Rabu, 06 Juli 2022.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat diajukan untuk sidang Terbuka pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 11 Juli 2022
Panitia Ujian Seminar Hasil Disertasi
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

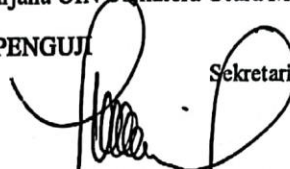
TIM PENGUJI

Ketua



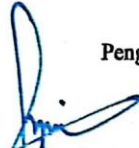
Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, M.Ag.
NIP. 19620814 1992203 1 003
NIDN. 2014086201

Sekretaris



Dr. Phil. Zainul Fud, MA
NIP. 19670423 199403 1 004
NIDN. 2023046703

Penguji I



Prof. Dr. Asnuni, M.Ag.
NIP. 19540820 198203 1 002
NIDN. 2020085402

Penguji

Penguji II



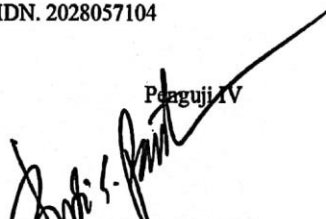
Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.Hum.
NIP. 197105282008012013
NIDN. 2028057104

Penguji III



Prof. Dr. Pagar, M.Ag.
NIP. 195812311988031016
NIDN. 2031125810

Penguji IV



Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum.
NIP. 19760420 200901 1 009
NIDN. 2020047602

Penguji V



Prof. Dr. OK Saidin, S.H., M.Hum.
NIP. 19620213 199003 1 002
NIDN. 0013026203

Mengetahui :

Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara
Medan



Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, M.Ag.
NIP. 19620814 1992203 1 003
NIDN. 2014086201

Abstrak

Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Perspektif Māqāṣid Al-Syaṁ'ah, Keadilan, dan Teori Sistem



Nama : Arminsyah
NIM : 400117312
Prodi : S3 Hukum Islam
Tempat/ Tanggal Lahir : Kampung Mesjid, 01 April 1993
Nama Orang Tua : Amri (Ayah)
Asiah (Ibu)
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.
2. Dr. Fauziah, Lubis, S.H., M. Hum

Terpuruknya perekonomian Indonesia membutuhkan penanganan segera, investasi di Indonesia harus didesign lebih menarik bagi investor, obesitas dan tumpang tindihnya regulasi menjadi penghalang investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, oleh Pemerintah dan DPR disahkan 11 Klaster, 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal dengan metode *omnibus law*, salahsatunya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 79 UU Cipta Kerja yang mengatur tentang *Pertama*, istirahat mingguan bagi pekerja, sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah no 35 tahun 2021, istirahat mingguan hanya diberi bagi pekerja satu hari dalam seminggu. *Kedua*, Pihak Perusahaan tidak berkewajiban lagi memberikan Istirahat Panjang bagi pekerja. Buruh, Ormas dan Mahasiswa protes besar-besaran terhadap Undang-undang ini, selain prosesnya sekitar *seratus hari* juga ditemukan banyak pasal-pasal yang mengeksploitasi para pekerja.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*, penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* sebagai metodologi penelitiannya, pendekatan metodologis dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Permasalahan dalam penelitian ini adalah Mengapa diundangkan Pasal 79 Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja? Bagaimana Pengaturan Hak Pekerja Perspektif *Māqāṣid al-Syaṁ'ah*, Keadilan, dan teori sistem Jasser Auda? Bagaimana Penerapan Hak Pekerja dalam Pasal 79 Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Māqāṣid al-Syaṁ'ah*, Keadilan, dan teori sistem?

Temuan hasil analisis penelitian ini didapatkan *Pertama*, keadilan belum bisa dirasakan oleh setiap pekerja perundang-undangan ini secara proporsional. Islam tidak mengizinkan umatnya merenggut hak orang lain dengan cara batil, *Māqāṣid al-Syaṁ'ah* dalam pasal ini bertentangan dengan prinsip (حفظ النفس) Perlindungan terhadap jiwa, pasal ini mengeksploitasi jiwa pekerja, teori sistem mewajibkan Pembahasan Undang-undang itu harus terbuka (*openess*) juga UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. pasal-pasal ini harus dikaji kembali secara konstitusional, dengan metode *Māqāṣid al-Syaṁ'ah* demi terselenggaranya *Rules* yang jelas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci: *Hak Pekerja, UU Cipta Kerja, Māqāṣid al-Syaṁ'ah, Keadilan, Teori Sistem*

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	13
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Batasan Istilah	14
E. Kerangka Teori.....	18
F. Kajian Terdahulu.....	52
G. Metode Penelitian.....	54
H. Sistematika Pembahasan.....	61

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Seputar <i>Maqa>}{id al-Syari>ah</i>	
1. <i>Maqa>}{id al-Syari>ah</i>	63
2. Pembagian <i>Maqa>}{id al-Syari>ah</i>	74
3. <i>Maqa>}{id al-Syari>ah</i> Perspektif Asy-Sya>}{ibi.....	79
B. Teori Keadilan John Rawls.....	107

C. Teori Sistem Jasser Auda.....	124
D. Hak Pekerja dalam Perspektif Islam	
1. Kewajiban Bekerja Dalam Islam.....	147
2. Hak-Hak Pekerja Menurut Islam.....	148
E. Tentang Ketenagakerjaan	
1. Pekerja.....	153
2. Pengusaha dan Perusahaan.....	156
3. Pengawasan dalam Bidang Ketenagakerjaan.....	157
F. Hak-Hak Pekerja Menurut Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	
1. Hak Pekerja Menurut Undang-undang 1945	162
2. Hak Pekerja Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.	163
3. Poin-Poin Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pada Undang-Undang Cipta Kerja.....	166
G. Konsepsi, Manfaat, Kelemahan Omnibus Law Dan Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pada Undang-Undang Cipta Kerja	
1. Cipta Kerja Sebagai Konsepsi <i>Omnibus Law</i>	167
2. Manfaat <i>Omnibus Law</i>	171
3. Kelemahan <i>Omnibus Law</i>	174
4. Karakteristik <i>Omnibus Law</i>	176
5. <i>Omnibus Law</i> di Indonesia	183
H. Pasal-Pasal Kontroversial Undang-Undang Cipta Kerja	
1. Pasal tentang waktu istirahat dan cuti.....	187
2. Pasal tentang upah.....	190

3. Pasal Tentang Waktu Kerja.....	194
4. Pasal tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	197
5. Pasal tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).....	201
6. Pasal tentang uang penghargaan masa kerja.....	204
7. Pasal tentang jaminan pensiun.....	206
8. Pasal Tentang Pesangon.....	210

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	214
B. Sifat Penelitian.....	214
C. Jenis Penelitian.....	215
D. Pendekatan Penelitian.....	215
E. Sumber Penelitian.....	217
F. Teknik Analisis Data.....	218

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Metode Istinbat Hukum <i>Maqas>id al-Syari>ah</i>	221
B. Teori dan analisis pasal 79 tentang waktu istirahat dan cuti.....	237
C. Pasal 79 tentang waktu istirahat dan cuti dalam perspektif <i>Maqas>id al-Syari>ah</i>	239
D. Dampak <i>Negatif</i> Penerapan Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bagi pekerja/buruh di Indonesia	243
E. Konsep <i>Maqas>id al-Syari>ah</i> Terhadap Penerapan Pasal 79, UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bagi pekerja/buruh di	

Indonesia.....	
250	
F. Analisis Pasal 79 Undang Undang Cipta Kerja Perspektif <i>Māqāṣid al-Syarīah</i>	
255	
G. Analisis Pasal 79 Cipta Kerja Perspektif <i>Keadilan</i> John Rawls.....	270
H. Analisis Pasal 79 Undang Undang Cipta Kerja Perspektif Sistem Jasser Auda	279
I. Analisis Terhadap Pasal 79, UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bagi Pekerja di Indonesia.....	292
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	303
B. Saran-saran	303
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 336 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

**DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian pendidikan program Doktor pada Program Studi **Hukum Islam** mahasiswa atas nama **Tri Eka Muhtarivansyah Waruwu NIM.94305110546**, judul Disertasi "**Konsepsi Rehabilitasi Berbasis Syariah Bagi Pecandu Narkotika (Studi Kasus Pada lembaga Rehabilitasi di Provinsi Sumatera Utara)**", perlu diatur ketentuan tentang pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi dalam bentuk Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia Pelaksana Ujian Tertutup Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401 dan 032402/B.II/3/2020, tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan tahun 2020-2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

- Kesatu : Menetapkan Panitia, Penguji dan Pembimbing Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa atas nama **Tri Eka Muhtarivansyah Waruwu**, NIM. **94305110546**, sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tugas Panitia adalah:
- Mempersiapkan administrasi Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
 - Melaksanakan Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
 - Mengumumkan hasil Ujian Pendahuluan Disertasi (Tertutup)
- Ketiga : Pelaksanaan ujian tertutup disertasi ini akan dilaksanakan pada **Kamis, 28 Juli 2022**.
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan
Tanggal 26 Juli 2022

Direktur,



Hasan Bakti Nasution

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Rektor UIN Sumatera Utara Medan
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA MEDAN
Nomor 336 Tahun 2022
Tanggal 26 Juli 2022

TENTANG
PENGUJI DAN PEMBIMBING UJIAN TERTUTUP DISERTASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NO	NAMA	Gol	JABATAN	KET.
1.	Prof. Dr. Pagar, M.Ag.	IV	Penguji Internal	
2.	Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum.	IV	Penguji Internal	
3.	Prof. Dr. Edi Warman, S.H. M.Hum.	IV	Penguji Eksternal	
4.	Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.	IV	Penguji Internal	
5.	Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum.	IV	Penguji Internal	



Direktur,

Hasan Bakti Nasution

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA MEDAN
Nomor 336 Tahun 2022
Tanggal 26 Juli 2022

TENTANG
PANITIA UJIAN TERTUTUP DISERTASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NO	NAMA	Gol	JABATAN	KET.
1.	Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A.	IV	Ketua	
2.	Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.	IV	Sekretaris	
3.	Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I., M.A.	IV	Sekretariat	
4.	Dr. Budi Sastra Panjaitan, S.H., M.Hum	IV	Sda	
5.	Bambang Lesmono, S.E., M.E.	III	Sda	
6.	Dedi Junaidi, S.E.	III	Sda	
7.	Ramli, S.E.	III	Sda	
8.	Gatot Teguh Arifyanto. M.H.	II	Sda	



Direktur,

Hasan Bakti Nasution

DISERTASI

**KONSEPSI REHABILITASI BERBASIS SYARIAH
BAGI PECANDU NARKOTIKA
(Studi Kasus Pada Lembaga Rehabilitasi di Provinsi Sumatera Utara)**

Oleh:

TRI EKA PUTRA MUHTARIVANSYAH WARUWU
NIM: 94315010546

**PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSETUJUAN

DISERTASI

**KONSEPSI REHABILITASI BERBASIS SYARIAH
BAGI PECANDU NARKOTIKA
(Studi Kasus Pada Lembaga Rehabilitasi di Provinsi Sumatera Utara)**

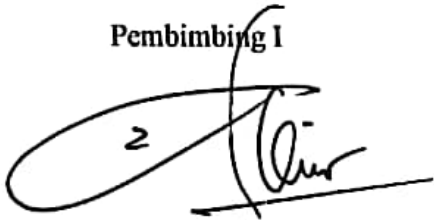
OLEH

TRI EKA PUTRA MUHITARIVANSYAH WARUWU
NIM: 94315010546

Dapat disetujui untuk mengikuti Ujian Seminar Hasil Disertasi sebagai
persyaratan memperoleh gelar Doktor Hukum Islam (Dr) pada
Program Studi Hukum Islam Pascasarjana
UIN Sumatera Utara Medan

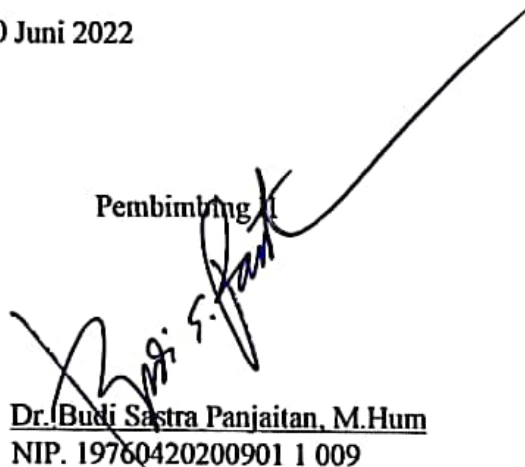
Medan, 20 Juni 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. Pagar, M.Ag
NIP. 19581231198803 1 016

Pembimbing II



Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum
NIP. 19760420200901 1 009

PENGESAHAN UJIAN SEMINAR HASIL

Disertasi berjudul: "Konsepsi Rehabilitasi Berbasis Syari'ah Bagi Pecandu Narkotika (Studi Kasus Pada Lembaga Rehabilitasi di Provinsi Sumatera Utara" atas Nama: Tri Eka Putra Muhtarivansyah Waruwu, NIM. 94315010546 Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam Seminar Hasil Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Selasa, 28 Juni 2021.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat diajukan untuk sidang tertutup pada Program Studi Hukum Islam.

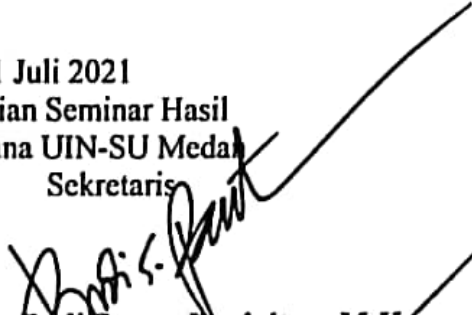
Medan, 01 Juli 2021

Panitia Ujian Seminar Hasil
Pascasarjana UIN-SU Medan
Sekretaris

Ketua



Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, M.A
NIP. 19791020 200901 1 010
NIDN. 2020107903

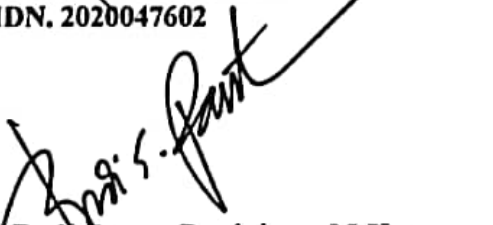


Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum
NIP. 19760420200901 1 009
NIDN. 2020047602

Anggota



Prof. Dr. Pagar, M.Ag
NIP. 19581231 198803 1 016
NIDN. 2031124810.



Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum
NIP. 19760420200901 1 009
NIDN. 2020047602



Dr. Phil. Zainul Fuad, M. A
NIP. 19670423 199403 1 004
NIDN. 2023046703



Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum
NIP. 19810828 200901 1 011
NIDN. 2028088103

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Islam



Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, M.A
NIP. 19791020 200901 1 010
NIDN. 2020107903



ABSTRAKSI

KONSEPSI REHABILITASI BERBASIS SYARIAH BAGI PECANDU NARKOTIKA (Studi Kasus Pada Lembaga Rehabilitasi di Provinsi Sumatera Utara)

Nama : **Tri Eka Putra Muhtarivansyah Waruwu**
Nim : **94315010546**
Prodi : **Hukum Islam**
Tempat/ Tanggal, Lahir : **Binjai, 09 Mei 1991**
Nama Orang Tua : **Ayah : Drs. Muhrim Waruwu (Alm)**
Ibu : Syahdinar Tanjung, S. Pd.I (Almh)
Pembimbing : **1. Prof. Dr. Pagar, M.Ag**
2. Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum

Pecandu narkotika merupakan orang yang sakit baik secara jasmani maupun rohani. Pecandu narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan social berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa Terapi medis saja tidak cukup/lengkap untuk kesembuhan pecandu narkotika. Kebutuhan manusia terhadap agama atau tuhan tidak dapat dinafikkan sehingga salah satu metode rehabilitasi yang efektif harus menggunakan pendekatan agama (syariah). Namun hingga saat ini IPWL di Sumatera Utara belum ada yang menerepkan rehabilitasi berbasis agama dengan sistematis dan terpadu. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pengaturan hukum rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Indonesia, menganalisis kendala pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Indonesia serta memformulasikan konsep rehabilitasi berbasis syariah bagi pecandu narkotika.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field reseach*) sedangkan dari sisi disiplin ilmu yang digunakan penelitian ini merupakan penelitian empris. model penelitian (*mode of inquiry*) penelitian ini dilakukan dengan model penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisis Milles and Huberman dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hukum rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Indonesia telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Beberapa hal menjadi kendala IPWL di Sumatera Utara dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3. *pertama* Kendala pada Residen seperti minat dan kondisi residen yang tidak stabil. *Kedua* factor internal berupa keterbatasan sarana dan prasarana, masih terbatasnya kompetensi SDM dalam melaksanakan Metode rehabilitasi Berbasis Agama, Belum ada Modul/ Panduan dalam melakukan rehabilitasi berbasis Syari'ah dan terbatasnya modal yang baku dalam proses pembinaan (SOP) SDM dan Sinergi antar SDM masih belum maksimal. *Ketiga* faktor eksternal berupa bantuan dari pihak pemerintah terkait dirasakan masih minim, belum ada payung hukum tentang Rehabilitasi berbasis agama, masyarakat masih memahami bahwa pecandu narkotika adalah aib bukan penyakit, sehingga jika keluarga yang menjadi pecandu terkesan disembunyikan dan tidak mau melapor ke IPWL. konsep rehabilitasi berbasis Syariah bagi pecandu narkotika dapat dilakukan dengan cara menggunakan agama (Syari'at) sebagai pendekatan dan metode dalam terapi dan rehabilitasi pecandu narkotika. Sasaran rehabilitasi berbasis syariah adalah manusia secara utuh yang dapat dilakukan dengan cara pembinaan jiwa, pembinaan spiritual, pembinaan akhlak dan pembinaan fisik proses dan teknik rehabilitasi/psikoterapi Islam dapat dilakukan dengan 3 tahapan tahapan *Takhalli* (pembersihan diri), Tahap *Tahalli* (pengembangan diri) dan Tahap *Tajalli* (Penyempurnaan Diri)

Key Word: Narkotika, Rehabilitasi, Pecandu, Syari'at



ABSTRACTION

SHARIA-BASED REHABILITATION CONCEPT FOR NARCOTICS ADDICTS (Case Study at a Rehabilitation Institute in North Sumatera Province)

Name : **Tri Eka Putra Muhtarivansyah Waruwu**
Nim : **94315010546**
Prodi : **Islamic Law**
Place / Date, Born : **Binjai, 09 May 1991**
Parent's Name : **Father : Drs. Muhrim Waruwu (Alm)**
Mother : Syahdinar Tanjung, S. Pd.I (Almh)
Counselor : **1. Prof. Dr. Pagar, M.Ag**
2. Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum

Narcotics addicts are people who are sick both physically and spiritually. Narcotics addicts are required to undergo medical and social rehabilitation based on existing legislation. Various studies have proven that medical therapy alone is not sufficient/complete to cure narcotics addicts. Human needs for religion or God cannot be denied so that one of the effective rehabilitation methods must use a religious approach (sharia). However, until now IPWL in North Sumatra has not yet implemented religion-based rehabilitation in a systematic and integrated manner. This study intends to examine the legal regulation of rehabilitation for narcotics addicts in Indonesia, analyze the obstacles to implementing rehabilitation for narcotics addicts in Indonesia and formulate the concept of sharia-based rehabilitation for narcotics addicts.

This research is a field research (Field research) while in terms of disciplines used in this research is an empirical research. research model (mode of inquiry) this research was conducted with a descriptive qualitative research model using the Milles and Huberman analysis method with an inductive approach. The results of this study indicate that the legal regulation of rehabilitation for narcotics addicts in Indonesia has been established based on laws and regulations where narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. Several things became obstacles to IPWL in North Sumatra in carrying out rehabilitation for narcotics addicts, which can be grouped into 3. First, Constraints on Residents such as unstable resident interests and conditions. The two internal factors are limited facilities and infrastructure, the limited competence of human resources in implementing the Religion-Based Rehabilitation Method, there is no Module/Guideline for carrying out Shari'ah-based rehabilitation and the limited standard capital in the HR development process (SOP) and Synergy between HR is still lacking. maximum. The three external factors in the form of assistance from the relevant government are felt to be minimal, there is no legal umbrella on religion-based rehabilitation, the public still understands that narcotics addicts are a disgrace, not a disease, so if the family who becomes addicts seems hidden and does not want to report to IPWL. the concept of Sharia-based rehabilitation for narcotics addicts can be done by using religion (Shari'ah) as an approach and method in the therapy and rehabilitation of narcotics addicts. The targets of sharia-based rehabilitation are human beings as a whole which can be done by way of mental development, spiritual development, moral development and physical development. Islamic rehabilitation/psychotherapy processes and techniques can be carried out in 3 stages: Takhalli (self-cleaning), Tahalli Stage (self-development) and Tajalli Stage (Self Perfection)

Key Word: Narcotics, Rehabilitation, Addicts, Shari'at



المخلص

مفهوم إعادة التأهيل على أساس الشريعة

لإدمان المخدرات

(دراسة حالة في معهد إعادة التأهيل في مقاطعة سومطرة الشمالية)

الاسم: تری ایك فترا محترفنسه وارو

نیم: 94315010546

برودي: الشريعة الإسلامية

مدمنو المخدرات هم أشخاص مرضى جسدياً وروحياً. يُطلب من مدمني المخدرات الخضوع لإعادة التأهيل الطبي والاجتماعي بناءً على التشريعات القائمة. لقد أثبتت دراسات مختلفة أن العلاج الطبي وحده لا يكفي / كامل لعلاج مدمني المخدرات. لا يمكن إنكار احتياجات الإنسان للدين أو الله ، لذلك يجب أن تستخدم إحدى طرق إعادة التأهيل الفعالة نهجاً دينياً (الشريعة). ومع ذلك ، حتى الآن في شمال سومطرة لم تنفذ بعد إعادة التأهيل القائم على الدين بطريقة منهجية ومتكاملة. تهدف هذه الدراسة إلى فحص التنظيم القانوني لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في إندونيسيا ، وتحليل العقوبات التي تعترض تنفيذ إعادة التأهيل لمدمني المخدرات في إندونيسيا ، وصياغة مفهوم إعادة التأهيل القائم على الشريعة لمدمني المخدرات.

هذا البحث هو بحث ميداني (بحث ميداني) بينما من حيث التخصصات المستخدمة في هذا البحث هو بحث تجريبي. تم إجراء هذا البحث باستخدام نموذج بحثي نوعي وصفي باستخدام أسلوب التحليل مع نهج استقرائي. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن التنظيم القانوني لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في إندونيسيا قد تم وضعه بناءً على القوانين واللوائح التي تتطلب من مدمني المخدرات وضحايا تعاطي المخدرات الخضوع لإعادة التأهيل الطبي وإعادة التأهيل الاجتماعي. أصبحت العديد من الأشياء عقبات أمام في شمال سومطرة في إجراء إعادة تأهيل مدمني المخدرات ، والتي يمكن تصنيفها في 3. أولاً ، القيود المفروضة على السكان مثل اهتمامات وظروف المقيمين غير المستقرة. العاملان الداخليان هما محدودية المرافق والبنية التحتية ، والكفاءة المحدودة للموارد البشرية في تنفيذ أسلوب إعادة التأهيل القائم على الدين ، ولا توجد وحدة نمطية / دليل لتنفيذ إعادة التأهيل المبني على الشريعة ورأس المال المعياري المحدود في عملية تطوير الموارد البشرية. والتأثر بين الموارد البشرية لا يزالان غير متوفرين. يُعتقد أن العوامل الخارجية الثلاثة المتمثلة في المساعدة من الحكومة ذات الصلة ضئيلة للغاية ، ولا توجد مظلة قانونية لإعادة التأهيل على أساس الدين ، ولا يزال الجمهور يدرك أن مدمني المخدرات وصمة عار ، وليس مرضاً ، لذلك إذا كانت الأسرة يصبح مدمناً يبدو مخفياً ولا يريد إبلاغ. يمكن أن يتم مفهوم التأهيل الشرعي لمدمني المخدرات باستخدام الدين (الشريعة) كأسلوب وطريقة في علاج وإعادة تأهيل مدمني المخدرات. إن أهداف إعادة التأهيل المبني على الشريعة هي البشر ككل ويمكن القيام به

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK.....	iii
TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Perumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Kajian Terdahulu	12
F. Landasan Teori	16
G. Metodologi Penelitian	28
H. Sistematika Pembahasan	31
BAB II TINJAUAN UMUM PENYALAHGUNA NARKOTIKA DAN REHABILITASI	
A. Pengertian dan Konsep Dasar Narkotika.....	33
B. Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	63
C. Dampak Narkotika bagi Kesehatan.....	73
D. Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika	81
BAB III PENGATURAN HUKUM REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA	
A. Telaah Historis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Narkotika di Indonesia	90
B. Sanksi Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Positif Indonesia	101
C. Pengaturan Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika	113
D. Rehabilitasi Pecandu Narkotika Sebagai Kebijakan Depenalisasi.....	124
BAB IV PELAKSANAAN REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI WILAYAH SUMATERA UTARA	
A. Profil Institusi Penerima Wajib Laporan.....	144

B. Pelaksanaan Rehabilitasi Pada IPWL di Sumatera Utara.....	150
C. Pendekatan Agama dalam Proses Rehabilitasi Pecandu Narkotika di IPWL Sumatera Utara	167
D. Kendala Yang Dihadapi IPWL Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi	180

BAB V KONSEPSI REHABILITASI BERBASIS SYARI'AH

BAGI PECANDU NARKOTIKA

A. Status Hukum Penyalahguna Narkotika Dalam Islam	183
B. Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pidana Islam	195
C. Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Perspektif Pidana Islam	203
D. Peranan Agama dalam Rehabilitasi Pecandu Narkotika	202

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	242
B. Rekomendasi/ Saran	243

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN